



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**UNIT KERJA** : KECAMATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MASNUN**
2. Jabatan : **CAMAT**
3. NHK : **465008**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.351.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m<sup>2</sup>/56 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 216.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m<sup>2</sup>/30 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 1772 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
4. Tanah Seluas 4000 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 500 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 10.000.000
6. Tanah Seluas 200 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
7. Tanah Seluas 200 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 129.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 35.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 7.086.006**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.522.086.006
III. HUTANG	Rp.	300.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.222.086.006

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.